

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT

Tabita Pipit

Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

tabitapipit95@gmail.com

Linawati

Dosen Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

linawati@unpkediri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat telah menerapkan sistem pemberian kredit yang memadai. Pengendalian internal yang berlaku pada KSP Mitra Rakyat sudah dapat dikatakan memadai dan mendukung efektivitas pemberian kredit. Adapun masih ada kelemahan dalam proses pemberian kreditnya, yaitu 1) masih diutamakan asas kekeluargaan dalam pemberian kreditnya. Kemudahan ini oleh para debitur (anggota) disalahgunakan, seperti menyepelkan tagihan kredit, sehingga para debitur tidak membayar tepat waktu, yang berakibat terjadinya kredit macet. 2) dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat tidak ada proposal permohonan kredit. Calon debitur (anggota) saat mengajukan permohonan kredit hanya membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit, sehingga kurangnya informasi latar belakang dari anggota. Beberapa temuan perlu diwaspadai dan diperhatikan oleh KSP Mitra Rakyat, karena dapat berakibat meningkatnya kredit macet yang memperlambat aktivitas operasi.

Kata kunci : sistem pengendalian internal, efektivitas, pemberian kredit

Abstract

This study aims to analyze the role of internal control in supporting the effectiveness of lending to KSP Mitra Rakyat. This research is a qualitative descriptive study. The research data consists of primary data and secondary data, obtained from interviews, observation and documentation. Data validity is done by source triangulation, technical triangulation, and member check. The findings of the research results show that the credit granting system at KSP Mitra Rakyat has implemented an adequate credit system. Internal controls that apply to the People's Partnership KSP can be said to be adequate and support the effectiveness of lending. There are still weaknesses in the process of granting credit, namely 1) the principle of kinship is still prioritized in granting credit. This convenience by debtors (members) is misused, such as underestimating credit bills, so that debtors do not pay on time, which results in bad credit. 2) in the process of granting credit at KSP Mitra Rakyat there is no proposal for credit. Debtor candidates (members) when applying for credit only carry credit application requirements files, so there is a lack of background information from members. Some findings need to be watched out and noticed by KSP Mitra Rakyat, because it can result in an increase in bad credit which slows operating activities.

Keywords: internal control system, effectiveness, credit lending

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang secara nyata dalam setiap kegiatannya berupaya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (para anggota), sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian.

Koperasi merupakan salah satu bagian dari tatanan dan susunan ekonomi negara, di mana dalam kegiatannya koperasi turut membantu pemerintah dalam upaya untuk mencapai kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi anggota koperasi maupun masyarakat di sekitarnya (Rusdiyono, 2009).

Menyadari pentingnya peran koperasi dalam menyokong pembangunan perekonomian nasional, keberadaan koperasi di Indonesia dinaungi oleh landasan hukum yang kuat dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Koperasi terbagi atas beberapa macam dan jenis. Kategori pembagian macam dan jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan bersama, kesamaan kegiatan dan kepentingan para anggotanya baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam KSP kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada anggotanya dalam bentuk penyaluran atau pemberian kredit. KSP berusaha memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya, dengan memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya, dan memberikan bunga yang tinggi pada simpanan (tabungan). Hal ini dilakukan untuk menjaga anggotanya tidak berhutang pada rentenir atau terlilit hutang pada lembaga lain dengan bunga tinggi.

Dalam menjalankan kegiatan pemberian kredit, terdapat berbagai prosedur yang mendasarinya. Adapun prosedur-prosedur tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai proses jalannya permohonan kredit hingga sampai kredit tersebut dicairkan. Secara umum prosedur pemberian kredit meliputi: a) Permohonan kredit; b) Evaluasi atau analisis pemberian kredit; c) Keputusan pemberian kredit; d) Perjanjian kredit; dan e) Pencairan kredit (Kasmir, 2014).

KSP perlu melakukan pengelolaan kredit supaya penyaluran kredit dapat optimal dan meminimalkan risiko kredit. Pengelolaan dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pemberian kredit dengan pengendalian internal yang maksimal, supaya dapat membantu koperasi dalam menghindari kecurangan-kecurangan yang akan merugikan anggota serta koperasi sendiri.

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan suatu organisasi telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada, sehingga kegiatan operasional organisasi dapat berjalan lancar, aktiva organisasi dapat terjamin keamanannya, dan kecurangan serta pemborosan dapat dicegah. Agar pengendalian dapat berjalan dengan baik, maka harus diterapkan prosedur yang dapat menunjukkan bahwa proses pengendalian itu dilaksanakan.

Pentingnya pengendalian internal dalam setiap kegiatan organisasi, seperti halnya dalam pemberian kredit di KSP juga harus dilakukan. KSP harus mempunyai pengendalian internal yang baik dan memadai terhadap pemberian kredit. Hal ini dapat meningkatkan efektifitas pemberian kredit dan menghindari dan meminimalisir adanya risiko pemberian kredit, misalnya kredit bermasalah atau kredit macet. Pokok-pokok utama dalam pengendalian internal kredit meliputi 1) adanya pemisahan fungsi yang tegas antar bagian yang menangani kredit; 2) adanya kebijakan kredit yang jelas, tegas, dan tertulis yang disahkan oleh pimpinan; 3) adanya karyawan yang kompeten yang akan memproses kredit; dan 4) adanya fungsi review terhadap kredit yang diberikan, dan melakukan pemantauan atas kredit (Marbun, 2006).

Penelitian mengenai peran pengendalian internal dalam pemberian kredit, telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Papalangi (2013) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manado mendapatkan temuan bahwa sistem pengendalian internal sangatlah diperlukan dalam setiap aktivitas pemberian kredit. Misalnya dalam menjaga keakuratan informasi dari calon debitur, mengarsip berkas-berkas secara sistematis dan terkomputerisasi, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan.

Adapun penelitian Muzamil (2015) pada BRI Unit Karang Paci Samarinda, mendapatkan temuan bahwa lemahnya pengendalian internal yang ditunjukkan dengan struktur organisasi yang masih ada perangkapan tugas, yaitu pada bagian survey dengan analisis kredit yang dilakukan oleh satu orang, menimbulkan banyak kecurangan.

KSP Mitra Rakyat merupakan salah satu koperasi yang menyalurkan dananya pada masyarakat di daerah Pare Kabupaten Kediri dan sekitarnya yang tergolong sektor kredit mikro. Anggota dari KSP Mitra Rakyat berasal dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari petani, pedagang, hingga usaha kecil masyarakat. Tingkat pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat cukup tinggi, hal ini karena KSP Mitra Rakyat menerapkan azas kekeluargaan. Adanya kemudahan dan kelonggaran dalam pemberian kredit dan tagihan kredit, menimbulkan adanya kredit macet (kredit bermasalah), karena para anggota (debitur) merasa ada celah untuk melakukan kelalaian.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis peran pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KSP Mitra Rakyat yang berlokasi di Jl. TGP No. 17 Pare, Kabupaten Kediri. Pelaksanaan penelitian selama 5 bulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik deskriptif. Penelitian ini akan menjabarkan mengenai peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung ke lapangan yaitu sekaligus sebagai pengamat partisipan yang diketahui sepenuhnya oleh para pimpinan dan staff pada tempat penelitian.

Tahapan penelitian terdiri atas tiga tahapan, yaitu 1) tahap pra lapangan, 2) tahap pekerjaan lapangan, dan 3) tahap analisis data. Pada tahap pra lapangan, peneliti melakukan survei pendahuluan tentang masalah yang ada di lokasi penelitian, selanjutnya melakukan rancangan penelitian. Pada tahap pekerjaan lapangan peneliti melakukan pengumpulan data, dengan mewawancarai nara sumber yang relevan, melakukan observasi proses pemberian kredit, sampai dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat. Tahap terakhir adalah melakukan analisis data, peneliti melakukan analisis data yang didapatkan dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, dengan menginterpretasi data hasil wawancara dan hasil pengamatan di lapangan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan dan staff KSP Mitra Rakyat untuk mendapatkan data mengenai bagaimana proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat. Wawancara dilakukan dengan waktu dan tempat yang tidak bersamaan antara pimpinan dan staff, hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas data yang didapatkan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dalam proses pemberian kredit. Peneliti melakukan observasi beberapa kali untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun data sekunder didapatkan dari dokumentasi. Peneliti meminta beberapa dokumen dalam proses pemberian kredit, seperti struktur organisasi KSP Mitra Rakyat, *flowchart* prosedur pemberian kredit, lembar permohonan kredit, dokumen pencairan kredit, dan data kredit macet.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Menurut Sugiyono (2017), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan dan menjabarkan data, melakukan sintesa, memilih data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Sugiyono (2017), meliputi 1) reduksi data, 2) display data, 3) verifikasi data. Dalam reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Analisis dengan display data peneliti menarasikan data dalam bentuk teks, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada rumusan masalah dan dukungan dari data-data yang valid dan konsisten yang didapatkan peneliti saat terjun ke lapangan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan menjadi kredibel.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan temuan sangat diperlukan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *member check*, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Semua metode pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti, diharapkan mampu membuat data-data yang diperoleh dalam penelitian adalah valid dan kredibilitas data meningkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KSP Mitra Rakyat, beralamat di Jl. TGP No. 17 Pare, Kabupaten Kediri. Sesuai dengan namanya, KSP Mitra Rakyat merupakan koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi ini mayoritas adalah petani dan pedagang.

Dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat, telah terbagi dalam struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan tugas dengan jelas. Sistem pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian yang Terkait

Bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat meliputi a) bagian administrasi kredit, b) *account officer* (AO), c) pimpinan, d) kasir, dan e) *accounting*. Bagian administrasi kredit bertugas sebagai penganalisis calon debitur (anggota) dengan melakukan wawancara pada calon debitur (anggota), meneliti kelengkapan dan kelayakan berkas permohonan kredit serta meneliti keaslian dan keabsahan jaminan kredit. Pada bagian *Account Officer* (AO) bertugas melakukan survey lapangan ke calon debitur (anggota) dan melakukan pembinaan pada anggota mulai dari permohonan kredit hingga kredit tersebut dinyatakan lunas. Pimpinan berwenang untuk memberikan keputusan persetujuan atas permohonan kredit. Bagian kasir bertugas menyiapkan uang, mencetak semua berkas *form* pencairan kredit. Pada bagian *accounting* bertugas melakukan pencatatan pengeluaran kas atas pemberian kredit dan melakukan pembukuan.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen – dokumen yang dipergunakan dalam proses pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat meliputi: a) Formulir permohonan kredit. Formulir ini berisi data pemohon, data pengajuan pinjaman, data pinjaman, total penerimaan, serta data jaminan;

b) *Form survey* dan analisis kredit. Form ini digunakan untuk melakukan survey lapangan dan kelayakan untuk diberikan kredit; c) Berita acara pemeriksaan fisik jaminan. Dokumen ini merupakan dokumen laporan pelaksanaan pemeriksaan fisik jaminan yang digunakan oleh debitur; d) *Check list*, merupakan dokumen yang berisi daftar untuk mengecek kelengkapan data pengajuan kredit; e) Rincian penerimaan uang. Dokumen ini berisi rincian total penerimaan uang dan jangka waktu angsuran; d) Formulir perjanjian kredit, merupakan *form* yang berisi ketentuan-ketentuan dalam menjalani masa kredit; f) Fidusia, merupakan *form* penyerahan hak milik jaminan dari debitur; g) Surat pernyataan hak milik, merupakan dokumen berupa surat yang menyatakan bahwa jaminan kredit adalah benar-benar milik debitur.

3. Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan oleh KSP Mitra Rakyat terdiri dari buku kas kasir, buku harian kas, buku kas memorial, buku jurnal, buku besar, buku simpanan anggota, buku piutang.

4. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat meliputi a) Prosedur pengajuan berkas - berkas kredit; b) penyelidikan berkas pinjaman; c) Keputusan kredit; d) Penandatanganan akad; e) Realisasi. Pada prosedur pengajuan berkas - berkas kredit, bagian administrasi menjelaskan tatacara pengajuan kredit kepada calon debitur (anggota) mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi, serta melakukan wawancara dan meneliti kelengkapan berkas permohonan kredit. Pada prosedur Penyelidikan berkas pinjaman bagian administrasi melakukan *check list* kelengkapan berkas persyaratan kredit. Berkas yang sudah lengkap diberikan kepada *Account Officer* (AO) untuk dilakukan survei. Pada prosedur keputusan kredit, dilakukan pengajuan rekomendasi persetujuan kredit pada pimpinan. Setelah pimpinan memberikan persetujuan, prosedur selanjutnya adalah penandatanganan akad. Pada prosedur ini dilakukan penandatanganan kesepakatan kredit antara KSP dengan anggota. Tahap terakhir adalah prosedur realisasi, yaitu pencairan kredit kepada anggota.

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C. Penerapan prinsip-

prinsip tersebut sebagai berikut: a) *character*, dalam pemberian kredit, harus memastikan bahwa debitur mempunyai sifat, watak dan kelakuan baik, misalnya jujur, disiplin dan terbuka; b) *capacity*, dalam pemberian kredit memastikan kondisi usaha debitur, baik saat ini atau prospek dimasa mendatang dalam keadaan baik, hal ini untuk kepastian kemampuan membayar kredit; c) *capital*, memastikan debitur mampu menggunakan modal secara efektif, sehingga mampu menjaga likuiditasnya; d) *collateral*, memastikan jaminan yang diberikan debitur bersifat legal dan sepenuhnya milik debitur; e) *condition of economics*, memastikan kondisi ekonomi, sosial saat ini dan masa mendatang dalam keadaan kondusif.

6. Sistem pengendalian internal di KSP Mitra Rakyat

Pengendalian internal di KSP Mitra Rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut: a). *Segregation Of Duties*, merupakan pemisahan berdasarkan jabatan dan wewenang, serta dalam memberi persetujuan pencairan kredit berdasarkan tingkat jabatan; b). *Dual Control* dalam koperasi adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat, diadministrasikan, serta dibukukan dengan prosedur yang benar; c). *Dual Custody* adalah pengamanan atas barang berharga baik milik koperasi maupun milik nasabah, seperti: uang tunai, sertifikat, serta surat-surat berharga; d). *Number Control* merupakan pemberian nomor urut/ seri tercetak pada semua formulir kerja untuk pengamanan dan memudahkan proses akunting; e). *Training and Development Program* merupakan program untuk pelatihan dan pengembangan pegawai yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pegawai koperasi; f). *Mandatory Vacation* adalah suatu pengendalian koperasi yang mewajibkan setiap pegawai koperasi untuk mengambil cuti. Pada KSP Mitra Rakyat Kota Pare, cuti diberikan 12x dalam satu tahun.

Analisis Sistem Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat terdapat bagian yang melaksanakan pemberian kredit. Pemberian kredit tidak ditangani oleh satu bagian saja mulai dari awal sampai dengan akhir. Hal ini sesuai dengan teori Mulyadi (2016) bahwa dalam pelaksanaan suatu kegiatan transaksi, antara bagian operasional, penyimpanan, dan pencatatan harus terpisah satu dengan yang

lain. Pada KSP Mitra Rakyat hal ini telah diterapkan dengan terbaginya beberapa bagian yang menangani proses pemberian kredit, yaitu bagian administrasi Kredit, *Account Officer*, Pimpinan, Kasir, dan *Accounting* (Pembukuan). Masing –masing bagian mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, sehingga tidak ada perangkapan tugas dan tumpang tindih pekerjaan.

Pada KSP Mitra Rakyat telah menggunakan beberapa dokumen yang diperlukan dalam proses pemberian kredit. Dokumen yang digunakan tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu dokumen, dan setiap dokumen dibuat rangkap. Hal ini dapat mengurangi adanya manipulasi data, pengarsipan yang memadai, dan yang terpenting dokumen-dokumen tersebut dipergunakan untuk merekam terjadinya transaksi pemberian kredit pada tiap – tiap bagian pada KSP Mitra Rakyat.

Penggunaan dokumen di KSP Mitra Rakyat sudah cukup memadai. Hanya saja ditemukan bahwa dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat tidak ada proposal permohonan kredit. Pemohon kredit atau calon debitur (anggota) tidak membuat dan mengajukan proposal permohonan kredit. Calon debitur (anggota) saat mengajukan permohonan kredit hanya membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit. Informasi berkas-berkas apa saja yang diperlukan didapatkan dari anggota lain, atau bertanya terlebih dahulu pada pihak koperasi. Hal ini menimbulkan terjadinya risiko kredit, yaitu kredit macet karena kurangnya informasi latar belakang dari anggota.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat tidak hanya satu catatan. Catatan yang digunakan terdiri dari buku kas kasir, buku harian kas, buku kas memorial, jurnal, buku besar, buku simpanan anggota, buku piutang. Hal ini menunjukkan bahwa catatan yang dilakukan sudah memadai. Proses pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen yang digunakan dalam proses pemberian kredit.

Pada prosedur pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat sudah melalui prosedur – prosedur dalam pemberian kredit. Prosedur yang diterapkan sudah sepenuhnya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir (2014), prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan meliputi tahapan pengajuan berkas, penyelidikan berkas, pertimbangan

keputusan kredit, penandatanganan akad, dan tahap terakhir realisasi. Pelaksanaan prosedur pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat dapat dikatakan memadai.

Dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat menggunakan prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C. Penerapan analisis prinsip 5C di KSP Mitra Rakyat telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir (2014), meliputi prinsip *character, capacity, capital, collateral, condition of economics*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan berkas saat pengajuan kredit, survey lapangan pada calon debitur (anggota), serta pemeriksaan jaminan kredit yang diberikan calon debitur apakah legal dan dimiliki sepenuhnya oleh calon debitur. Konsistensi dalam penerapan analisis prinsip 5C ini dipergunakan untuk menjaga proses pemberian kredit yang mengurangi risiko kredit.

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit

Pada KSP Mitra Rakyat, setiap kegiatan operasionalnya menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk menjaga harta kekayaan organisasi, meningkatkan ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dalam proses pemberian kredit, harus memiliki pengendalian internal yang memadai, agar tujuan pemberian kredit tercapai, tidak ada penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan kerugian bagi koperasi. Berikut ini analisis pengendalian internal dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat:

a). Struktur organisasi yang memisahkan tugas dan wewenang secara jelas.

Dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat bagian yang menaungi pemberian kredit terdiri atas beberapa bagian, yang terpisah satu dengan yang lain dan mempunyai tugas dan wewenang yang tidak tumpang tindih. Hal ini diwujudkan dengan pengendalian di KSP Mitra Rakyat yaitu *Segregation Of Duties*, merupakan pemisahan berdasarkan jabatan dan wewenang, serta dalam memberi persetujuan pencairan kredit berdasarkan tingkat jabatan. Bagian – bagian yang menangani proses pemberian kredit pada KSP Mitra Rakyat terdiri dari bagian administrasi Kredit, *Account Officer*,

Pimpinan, Kasir, dan *Accounting* (Pembukuan).

b). Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat telah melaksanakan otorisasi berdasarkan tugas dan wewenang dari bagian yang menangani proses pemberian kredit. Di KSP Mitra Rakyat melakukan proses pencatatan berdasarkan dokumen yang telah diotorisasi bagian yang berwenang ke dalam catatan - catatan akuntansi. Hal ini diwujudkan di KSP Mitra Rakyat dengan penerapan *Dual Control*, memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat, diadministrasikan, serta dibukukan dengan prosedur yang benar.

c.) Praktik yang sehat

Praktik yang sehat diwujudkan dengan penerapan (1) *Dual Custody* yaitu pengamanan atas barang berharga baik milik koperasi maupun milik nasabah, seperti: uang tunai, sertifikat, serta surat-surat berharga; (2) *Number Control* merupakan pemberian nomor urut/seri tercetak pada semua formulir kerja untuk pengamanan dan memudahkan proses pembukuan; (3) *Mandatory Vacation* yaitu suatu pengendalian koperasi yang mewajibkan setiap pegawai koperasi untuk mengambil cuti. Selain hal di atas juga dilakukan audit internal mengenai laporan keuangan, pelaksanaan administrasi, dan efektivitas pemberian kredit yang dilaksanakan satu tahun sekali.

d). Karyawan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Karyawan merupakan elemen kunci dalam menunjang keberhasilan pengendalian internal organisasi. Karyawan sebagai sumber daya manusia secara tidak langsung adalah aset organisasi. Karyawan yang mempunyai kompetensi di bidang pekerjaannya menjadikan pekerjaan dilaksanakan dengan optimal, serta adanya sifat dan karakter karyawan yang baik akan menunjang suksesnya organisasi. Pada KSP Mitra Rakyat penerapan pengendalian atas karyawan yaitu dengan melakukan *Training and Development Program*, yaitu merupakan program pelatihan dan pengembangan pegawai yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pegawai koperasi. Hal lain yang dilakukan KSP Mitra Rakyat yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan dan kapabilitas sumber daya manusia.

Berdasarkan paparan dari elemen-elemen pengendalian internal yang diterapkan di KSP Mitra Rakyat, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat telah memadai dan menunjang efektivitas pemberian kredit.

PENUTUP

Hasil penelitian mendapatkan temuan bahwa sistem pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat telah memadai, ditunjukkan adanya bagian yang terpisah satu dengan yang lain, dokumen- dan catatan yang digunakan lengkap dan memadai. Pengendalian internal yang berlaku pada KSP Mitra Rakyat sudah dapat dikatakan memadai dan mendukung efektivitas pemberian kredit. Adapun masih ada kelemahan dalam proses pemberian kredit di KSP Mitra Rakyat, yaitu masih diutamakannya asas kekeluargaan dalam pemberian kreditnya, banyak pihak yang menyalahgunakan, seperti menyepelekan tagihan kredit, sehingga para debitur tidak membayar tepat waktu, yang berakibat terjadi kredit macet. Serta dalam proses pemberian kredit yang tidak disertai proposal permohonan kredit, menjadikan kurangnya informasi latar belakang dari anggota, dan dipergunakan untuk apa kredit yang diajukan. Hal ini perlu diwaspadai dan diperhatikan oleh KSP Mitra Rakyat, karena dapat berakibat meningkatnya kredit macet yang memperlambat aktivitas operasi.

Hasil penelitian ini dapat sebagai tambahan referensi mengenai peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit. Penelitian lanjutan yang mungkin dapat dilakukan yaitu bagaimana efektivitas dalam penerimaan kredit, baik di lingkup koperasi maupun perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi 2014). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marbun, A. 2006. *Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Sentosa Jakarta)*. Universitas Widyatama. online

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/441>. Diunduh pada April 2018.

- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Muzamil, M. 2015. Analisis Penerapan Sistem pengendalian Internal Penyauran Kredit Pada BRI Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3, (3): 661-674.
- Papalangi, R. S. 2013. Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT. BRI (Persero Tbk. Manado. *Jurnal EMBA*, 1, (3):1212-1220.
- Rusdiyono. 2009. Perkembangan Pengaturan Pendirian Koperasi di Indonesia. *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*. online
eprints.undip.ac.id/18447/1/RUSDIIYONO.pdf. Diunduh 20 April 2018.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*.